

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

100

Halaman III-1

Tabel 3.1
Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2014

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah (juta rupiah)	DSF (%)	Kriteria
2010	131.500.021.623	918.193.486.176	14,32%	Kurang
2011	420.663.048.857	1.494.990.970.280	28,14%	Sedang
2012	576.304.771.005	1.701.879.043.682	33,86%	Cukup
2013	728.965.301.483	1.971.245.936.682	36,98%	Cukup
2014	1.023.817.429.319	2.294.510.074.893	44,62%	Baik
Rata-rata	576.250.114.457	1.676.163.902.343	31,58%	Cukup

Sumber: LKPJ Tahun 2010-2014

Dari Tabel 3.1. diatas, rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kota Tangerang Selatan selama periode 2010-2014 sebesar 31,58%, masuk pada kategori **“cukup”**. Namun, walaupun rata-rata termasuk kategori “cukup” angka DSF setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan pada tahun 2014 mencapai angka 44,62% (**masuk kategori “baik”**). Peningkatan capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerahnya dengan terus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah perlu menganalisis aspek kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja pelaksanaan APBD mencerminkan perkembangan pendapatan dan belanja daerah.

3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

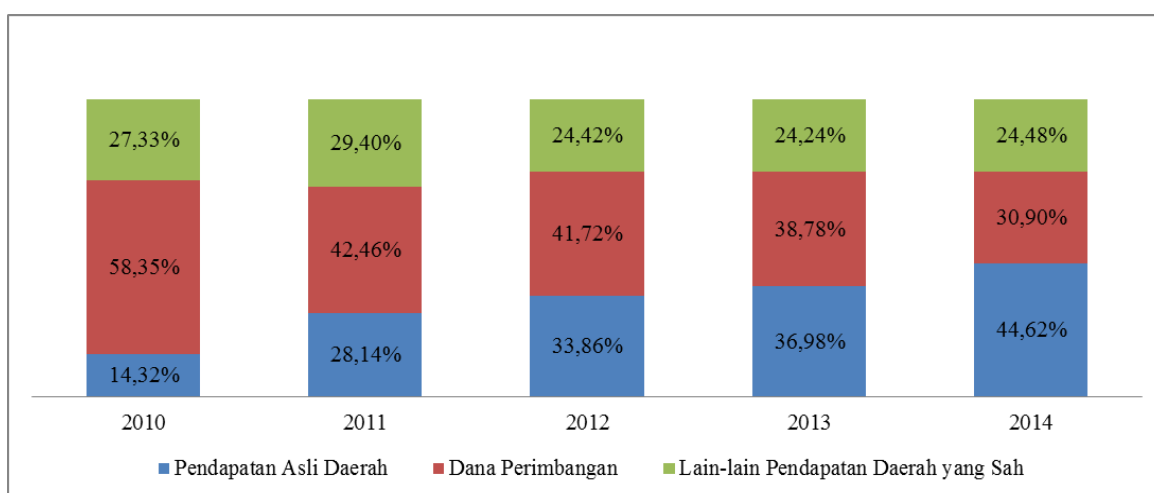
- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dilihat dari struktur pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir, kontribusi paling besar dalam pembentuk pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

sebesar 44,62%; disusul Dana Perimbangan sebesar 30,90%; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 24,48%. Kemudian jika ditelusuri lebih lanjut, kontribusi PAD mengalami tren peningkatan; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah relatif stabil. Hal ini berimplikasi pada menurunnya kontribusi Dana Perimbangan, dari 58,35% pada tahun 2010, dan terus menurun hingga 30,90% pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah Kota Tangerang Selatan **cukup baik**.

Adapun Struktur pendapatan APBD Kota Tangerang Selatan selama 5 tahun terlihat dalam Gambar 3.1 berikut ini.



Sumber: LKPJ Tahun 2010-2014, diolah

Gambar 3.1
Struktur Pendapatan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2014

Gambaran lengkap mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.2.
**Realisasi Pendapatan Daerah dan Rata-Rata Pertumbuhan
Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	131.500.021.623	420.663.048.857	576.304.771.005	728.965.301.483	1.023.817.429.319	80,96%
Hasil Pajak Daerah	89.983.231.492	378.420.418.487	487.364.145.094	607.251.022.635	864.576.346.012	104,08%
Hasil Retribusi Daerah	35.854.671.280	25.984.155.209	65.144.659.971	92.366.248.545	91.545.037.341	41,02%
Lain-lain PAD yang sah	5.662.118.851	16.258.475.161	23.795.965.940	29.348.030.303	67.696.045.966	96,88%
Dana Perimbangan	535.764.379.133	634.793.925.678	710.045.050.158	764.479.468.132	709.085.267.689	7,69%
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	294.965.296.933	164.284.953.678	190.042.283.158	228.036.559.132	124.676.450.689	-13,49%
Dana Alokasi Umum	228.858.482.200	412.540.972.000	473.309.757.000	536.177.454.000	566.429.457.000	28,48%
Dana Alokasi Khusus	11.940.600.000	57.968.000.000	46.693.010.000	265.455.000	17.979.360.000	1734,91%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	250.929.085.420	439.533.995.745	415.529.222.519	477.801.167.067	561.607.377.885	25,56%
Pendapatan Hibah	26.899.965.000,00	2.499.965.000	-	-	-	-47,68%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	177.755.235.326,00	257.668.357.005	287.820.099.519	338.098.561.067	401.892.280.885	23,25%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.773.885.094,00	149.045.673.740	83.889.123.000	129.705.606.000	133.704.247.000	88,82%
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	12.500.000.000,00	30.320.000.000	43.820.000.000	9.997.000.000	26.010.850.000	67,52%

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata Pertumbuhan
Atau Pemerintah Daerah Lainnya						
JUMLAH PENDAPATAN	918.193.486.176	1.494.990.970.280	1.701.879.043.682	1.971.245.936.682	2.294.510.074.893	27,22%

Sumber: LKPJ Tahun 2010-2014

Analisis perkembangan pendapatan daerah ini dapat dijelaskan antara lain:

- (1) Realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,22%, yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan semua unsur-unsur pendapatan daerah, yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Rata-rata pertumbuhan terbesar terdapat pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,96%; Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 25,56%; kemudian Dana Perimbangan sebesar 7,69%
- (2) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 80,96%. Semua komponen pembentuk PAD mengalami kecendrungan peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan terdapat pada Pajak Daerah, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 104,08%, disusul Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 96,88%, kemudian Retribusi Daerah sebesar 41,02%. Kenaikan yang cukup signifikan dari unsur PAD tersebut menunjukkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, terutama pajak daerah. Selain itu, meningkatnya PAD menunjukkan geliat perekonomian di Kota Tangerang Selatan semakin meningkat seiring meningkatnya pendapatan dunia usaha. Diharapkan dengan semakin meningkatnya PAD dapat meningkatkan kemandirian daerah, yang secara rata-rata selama tahun 2010-2014 sudah dalam kategori “cukup”
- (3) Realisasi penerimaan dana perimbangan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,69%. Dilihat dari komponen pembentuk Dana Perimbangan, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Dana Alokasi Khusus dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1734,91%; selanjutnya Dana Alokasi Umum sebesar 28,48%; kemudian Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -13,49%.
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 25,56%. Dilihat dari komponen pembentuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 99,82%; selanjutnya Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 67,52%; kemudian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 23,25%. Untuk Penerimaan Pendapatan Hibah tidak rutin setiap tahunnya.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021**

Adapun Pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan daerah dari tahun 2011-2014 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.3.
Pertumbuhan Masing-Masing Komponen Pendapatan Daerah
Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2014

Uraian	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
Pendapatan Asli Daerah	219,90%	37,00%	26,49%	40,45%	80,96%
Hasil Pajak Daerah	320,55%	28,79%	24,60%	42,38%	104,08%
Hasil Retribusi Daerah	-27,53%	150,71%	41,79%	-0,89%	41,02%
Lain-lain PAD yang sah	187,14%	46,36%	23,33%	130,67%	96,88%
Dana Perimbangan	18,48%	11,85%	7,67%	-7,25%	7,69%
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-44,30%	15,68%	19,99%	-45,33%	-13,49%
Dana Alokasi Umum	80,26%	14,73%	13,28%	5,64%	28,48%
Dana Alokasi Khusus	385,47%	-19,45%	-99,43%	6673,03%	1734,91%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	75,16%	-5,46%	14,99%	17,54%	25,56%
Pendapatan Hibah	-90,71%	-100,00%	0,00%	0,00%	-47,68%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	44,96%	11,70%	17,47%	18,87%	23,25%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	341,30%	-43,72%	54,62%	3,08%	88,82%
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	142,56%	44,53%	-77,19%	160,19%	67,52%
Jumlah Pendapatan	62,82%	13,84%	15,83%	16,40%	27,22%

Sumber: LKPJ Tahun 2010-2014

Selanjutnya kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2014 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut ini.

Tabel 3.4.
Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah
Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Pendapatan Asli Daerah	14,32%	28,14%	33,86%	36,98%	44,62%
Hasil Pajak Daerah	68,43%	89,96%	84,57%	83,30%	84,45%
Hasil Retribusi Daerah	27,27%	6,18%	11,30%	12,67%	8,94%
Lain-lain PAD yang sah	4,31%	3,86%	4,13%	4,03%	6,61%
Dana Perimbangan	58,35%	42,46%	41,72%	38,78%	30,90%
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55,06%	25,88%	26,76%	29,83%	17,58%
Dana Alokasi Umum	42,72%	64,99%	66,66%	70,14%	79,88%
Dana Alokasi Khusus	2,23%	9,13%	6,58%	0,03%	2,54%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	27,33%	29,40%	24,42%	24,24%	24,48%
Pendapatan Hibah	10,72%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70,84%	58,62%	69,27%	70,76%	71,56%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13,46%	33,91%	20,19%	27,15%	23,81%
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	4,98%	6,90%	10,55%	2,09%	4,63%
Jumlah Pendapatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: LKPJ Tahun 2010-2014

Berdasarkan Tabel 3.4. diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Komponen pembentuk Pendapatan Daerah yang memiliki kontribusi terbesar didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah, yaitu sebesar 44,62%, selanjutnya Dana Perimbangan sebesar 30,90%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 24,48%
- (b) Komponen Pendapatan Asli Daerah, kontribusi terbesar adalah Pajak Daerah sebesar 84,45%; Retribusi Daerah sebesar 8,94%; dan Lain-Lain PAD yang sah sebesar 6,61%.
- (c) Komponen Dana Perimbangan, kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum sebesar 79,88%; kemudian Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 17,58%; dan Dana Alokasi Khusus sebesar 2,54%
- (d) Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kontribusi terbesar adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 71,56%; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 23,81%; dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 4,63%. Selanjutnya Pendapatan Hibah sebesar 0%.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, walaupun pendapatan daerah mengalami peningkatan daerah setiap tahunnya yang ditandai dengan adanya pelampauan target yang signifikan, tidak berarti tidak ada masalah dalam pengelolaannya. Berdasarkan informasi dari LKPJ tahun 2014. Permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan pendapatan daerah di Kota Tangerang selatan pada tahun 2014, diantaranya adalah:

- (a) Masih terdapat potensi pajak yang belum dipungut, hal tersebut disebabkan oleh belum didaftarkannya legalitas usaha oleh wajib pajak;
- (b) Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak;
- (c) Masih rendahnya kesadaran dan keterbukaan wajib pajak dalam melaporkan omzet perusahaan sehingga berakibat pada belum optimalnya realisasi penerimaan pajak daerah;
- (d) Kondisi obyektif masih kurangnya kuantitas dan rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola pajak daerah;
- (e) Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

- (f) Terus melakukan sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah sehingga masyarakat dan dunia usaha memahami secara baik dan terdorong untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi;
- (g) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola pendapatan untuk meningkatkan hasil pajak dan retribusi daerah;
- (h) Meningkatkan koordinasi guna mengintegrasikan semua unsur kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan daerah yang bersifat lintas sektoral;
- (i) Menyampaikan daftar pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha ke SKPD terkait dalam rangka mendorong percepatan pemberian legalitas usaha sehingga dapat ditetapkan sebagai wajib pajak; dan
- (j) Melakukan pemeriksaan pajak daerah untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya jika dilihat dari realisasi belanja daerah, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Belanja Langsung, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 48,26% sedangkan Belanja Tidak Langsung rata-rata tumbuh sebesar 13,34%. Perkembangan realisasi belanja daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2014 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.5. berikut ini.

Tabel 3.5
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah
Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata Pertumbuhan
Belanja Tidak Langsung	352.654.528.941	474.845.994.987	471.833.082.021	515.363.002.404	567.417.473.463	13,34%
Belanja Pegawai	284.588.051.825	369.465.067.812	444.825.146.011	490.087.724.540	526.208.439.814	16,94%
Belanja Hibah	54.410.037.309	84.245.131.965	19.608.900.000	19.585.750.000	40.314.744.400	20,96%
Belanja Bantuan Sosial	4.782.245.000	12.562.200.000	5.057.900.000	5.223.040.000	308.100.000	3,03%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	8.874.194.807	8.573.595.210	1.108.103.210	278.683.964	314.669.281	-38,10%
Belanja Tidak Terduga	0	-	1.233.032.800	187.803.900	271.519.968	14,95%
Belanja Langsung	374.398.846.536	814.592.940.296	1.271.356.893.860	1.274.081.003.856	1.518.633.477.083	48,26%
Belanja Pegawai	65.877.099.240	89.781.858.160	144.875.496.550	172.262.297.500	210.235.476.675	34,65%
Belanja Barang dan Jasa	134.671.800.354	302.295.625.451	434.834.542.980	540.630.326.410	599.580.547.439	50,89%
Belanja Modal	173.849.946.942	422.515.456.685	691.646.854.330	561.188.379.946	708.817.452.969	53,54%
JUMLAH BELANJA DAERAH	727.053.375.477	1.289.438.935.283	1.743.189.975.881	1.789.444.006.260	2.086.050.950.546	32,94%

Sumber: LKPD Tahun 2010-2014

Analisis perkembangan belanja daerah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Realisasi belanja daerah, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Belanja Langsung, dengan rata-rata sebesar 48,26%, sedangkan Belanja Tidak Langsung rata-rata tumbuh sebesar 13,34%.
- (2) Persentase realisasi belanja tidak langsung cenderung meningkat pada periode 2010-2014 yang disebabkan meningkatkan semua unsur, kecuali Belanja Bantuan Sosial
- (3) Realisasi belanja langsung mengalami peningkatan yang cukup signifikan,

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

meningkatnya realisasi belanja langsung karena kenaikan unsur belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal, Ketiga unsur tersebut setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2014.

- (4) Terjadinya kenaikan porsi realisasi belanja tidak langsung dan realisasi belanja langsung menggambarkan bahwa kebutuhan pemerintah daerah dalam pembangunan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi anggaran agar tingginya penyerapan anggaran berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan daerah yang telah direncanakan.

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Rata2
Belanja Tidak Langsung	48,50%	36,83%	27,07%	28,80%	27,20%	33,68%
Belanja Pegawai	80,70%	77,81%	94,28%	95,10%	92,74%	88,12%
Belanja Hibah	15,43%	17,74%	4,16%	3,80%	7,10%	9,65%
Belanja Bantuan Sosial	1,36%	2,65%	1,07%	1,01%	0,05%	1,23%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	2,52%	1,81%	0,23%	0,05%	0,06%	0,93%
Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,00%	0,26%	0,04%	0,05%	0,07%
Belanja Langsung	51,50%	63,17%	72,93%	71,20%	72,80%	66,32%
Belanja Pegawai	17,60%	11,02%	11,40%	13,52%	13,84%	13,48%
Belanja Barang dan Jasa	35,97%	37,11%	34,20%	42,43%	39,48%	37,84%
Belanja Modal	46,43%	51,87%	54,40%	44,05%	46,67%	48,69%
Jumlah Belanja Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: LKPJ Tahun 2010-2014

Analisis proporsi realisasi belanja daerah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Realisasi belanja daerah, kontribusi rata-rata tertinggi terdapat pada Belanja Langsung dengan rata-rata sebesar 66,32%, sedangkan Belanja Tidak Langsung dengan rata-rata sebesar 33,68%.
- (2) Belanja Tidak Langsung memiliki rata-rata kontribusi sebesar 33,7%, kontribusi yang paling tinggi untuk belanja tidak langsung adalah dari belanja pegawai dengan rata-rata kontribusi sebesar 88,12%. Sedangkan untuk rata-rata kontribusi belanja hibah sebesar 9,65%; dan rata-rata kontribusi yang paling rendah adalah belanja Tak Terduga dengan rata-rata sebesar 0,07%.
- (3) Belanja Langsung memiliki kontribusi terbesar dengan rata-rata kontribusi sebesar 66,32%. Kontribusi terbesar untuk belanja langsung berasal dari belanja modal dengan rata-rata sebesar 48,69%, sedangkan rata-rata kontribusi terendah dari

belanja pegawai yang hanya sebesar 13,48%.

Berdasarkan informasi dari LKPJ Kota Tangerang Selatan tahun 2014, kondisi obyektif masih besarnya sisa anggaran belanja pada realisasi Belanja Langsung APBD Tahun Anggaran 2014, diantaranya disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

- (1) Penyesuaian terhadap regulasi pusat dan daerah diantaranya
 - Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara. Hal tersebut berakibat pada terjadinya sisa anggaran di beberapa SKPD diantaranya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terdapat sisa anggaran Rp.2,3 Milyar dan pada Sekretariat DPRD terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12,4 Milyar lebih disebabkan tidak diserapnya anggaran perjalanan dinas Luar Negeri dan kegiatan yang menggunakan akomodasi hotel.
 - Terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini berakibat pada tidak dilanjutkannya pembahasan tentang Raperda tentang Perencanaan Daerah.
 - Sisa anggaran sebesar Rp.1,8 Milyar pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah disebabkan tidak terealisasinya honorarium Pokja ULP yang awalnya akan dilaksanakan di akhir Tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan sehubungan ketentuan yang mengaturnya baru berlaku di Tahun 2015.
- (2) Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, sisa anggaran sebesar Rp.98,3 Milyar lebih(57,55%), disebabkan tidak terealisasinya pengadaan tanah untuk pembangunan Fly Over Gaplek sebanyak 42 bidang dari target 123 bidang; pengadaan tanah untuk Kantor Kelurahan Pondok Cabe Ilir dapat diselesaikan 85% yaitu seluas 1.410 m² dari 1.600 m² yang direncanakan, hal ini disebabkan harga yang disepakati melebihi plafon anggaran yang direncanakan; pengadaan tanah gedung kantor pemerintahan sebanyak 2 bidang tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh legalitas surat kepemilikan tanah yang berpotensi sengketa; pelaksanaan sertifikasi tanah aset baru terealisasi 20 bidang dari target 40 bidang di Tahun 2014, hal ini disebabkan 20 bidang lainnya masih berproses pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

- (3) Permasalahan yang dihadapi di Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman dalam melaksanakan paket pekerjaan yang berakibat terjadinya sisa anggaran sebesar Rp. 211,4 milyar lebih, diantaranya disebabkan adanya paket yang batal lelang dikarenakan bangunan fisik yang dikerjakan sebelumnya (tahap 1) belum selesai dikerjakan, kegiatan yang putus kontrak karena fisik tidak mencapai 100%, kegiatan yang gagal lelang, efisiensi kontrak sebesar Rp.62,428 milyar dan sisa anggaran sebesar Rp.124,238 milyar merupakan paket multiyears yang baru dicairkan uang mukanya sebesar Rp. 18,635 milyar (15%).
- (4) Terkait dengan sisa anggaran dari beberapa paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan dengan total sisa anggaran sebesar Rp.66,4 milyar lebih,- diantaranya terkendala oleh beberapa hal sebagai berikut:
- Terdapat kendala teknis yang diakibatkan kesalahan pada perencanaan teknis sehingga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Farmasi maupun Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang dianggarkan pada perubahan APBD. Dimana untuk pengadaan BMHP Labkesda terdapat kerendahan harga dari item barang yang terdapat pada DPA ketika dilakukan survey HPS (Harga Perkiraan Sendiri).
 - Terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan, banyak pasien Jaminan Kesehatan Daerah yang beralih ke BPJS Kesehatan untuk menjadi peserta BPJS mandiri, terutama pasien-pasien yang menderita penyakit kronis seperti gagal ginjal. Sehingga tagihan Jamkesda dari Rumah Sakit berkurang, selain itu juga beberapa RS mitra terlambat mengajukan klaim Jamkesda;
 - Tidak terlaksananya pembangunan puskesmas Pondok Cabe Ilir dan pengembangan puskesmas Pondok Jagung, serta pengadaan alat kesehatan (Alkes) disebabkan tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya.
 - Produk hukum tentang pelayanan kesehatan program JKN baru dirilis oleh Kemenkes RI pada bulan Mei sehingga Dinas Kesehatan dalam implementasinya mengalami beberapa kesulitan. Kemudian Peraturan Walikota tentang Jasa Pelayanan (Jaspel) Kesehatan terhadap masyarakat dan luar Kota Tangerang Selatan juga masih dalam proses, sehingga pencairan dana Jaspel yang telah dianggarkan tersebut tidak dapat dilakukan hingga akhir tahun.
- (5) Terkait sisa anggaran pada Dinas Pendidikan sebesar Rp.53,4 Milyar lebih hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- Efisiensi pekerjaan pembangunan ruang kelas SDN Pamulang Indah dan pengadaan Mebeuler sebesar Rp. 15,3 Milyar lebih.
 - Sisa anggaran pembangunan ruang kelas SDN Pamulang 2 dan SDN Pamulang 5, sisa anggaran pengadaan buku kurikulum dan pengadaan LKS.
- (6) Kondisi obyektif masih adanya usulan kegiatan fisik yang tidak didukung oleh perencanaan teknis yang baik serta Implementasi pengadaan barang dan jasa masih terkendala oleh permasalahan teknis yang diantaranya disebabkan oleh; kelembagaan ULP dan LPSE yang masih harus dibenahi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berkenaan dengan kendala yang dihadapi, maka langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menghindari permasalahan serupa di masa mendatang di antaranya adalah sebagai berikut:

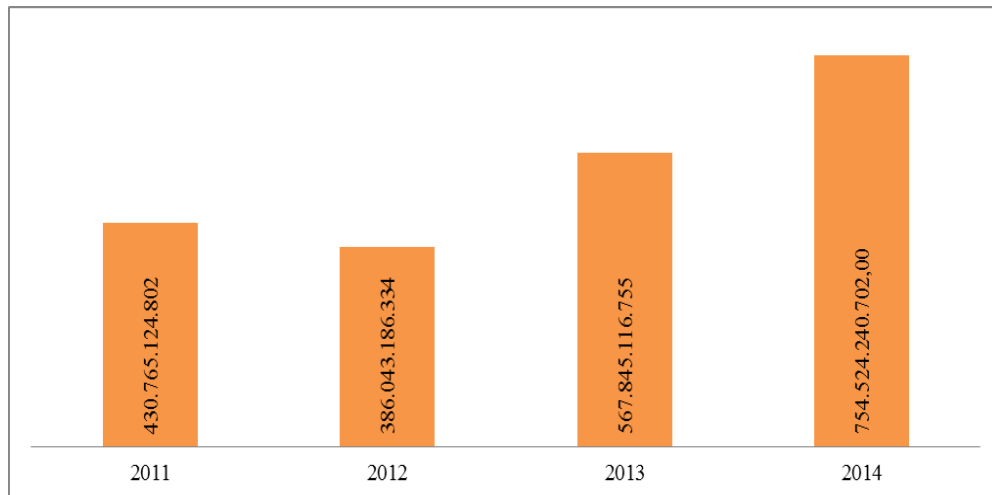
- (1) Terkait kendala faktor eksternal dan kewenangan lembaga/instansi lain, Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan negosiasi harga, pendekatan persuasif dan intensif, sosialisasi bersama tim teknis untuk meyakinkan masyarakat/ pemilik tanah terhadap harga yang sudah dihitung oleh Tim Appraisal, membentuk tim kajian dalam penyelesaian keberatan warga pada tahap persiapan, berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Tangerang. Sebagai langkah penyelesaian lebih lanjut Pemerintah daerah menginventarisir kembali sisa lokasi/bidang yang belum bisa dibebaskan sebagai target kegiatan pengadaan tanah di tahun berikutnya (tetap ditindaklanjuti) dan terus mengawal proses hukum yang ditempuh melalui pengadilan atau pendapat hukum kejaksaan atas permasalahan atau sengketa yang terjadi, sehingga seluruh target pembebasan lahan yang sudah direncanakan dapat tetap terlaksana dengan baik.
- (2) Terkait permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman khususnya dan SKPD lainnya yang melaksanakan pekerjaan fisik konstruksi, upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya permasalahan yang sama di tahun mendatang, diantaranya adalah mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan perencanaan teknis tiap usulan kegiatan/pekerjaan secara matang diantaranya: DED, FS, Master Plan, dan sebagainya, agar tidak menjadi kendala pada saat persiapan lelang, serta mendorong percepatan pengumuman lelang setelah RAPBD disetujui dan pelaksanaan lelangnya setelah APBD ditetapkan pada awal tahun anggaran.

(3) Kebijakan untuk meningkatkan kinerja ULP dan proses pengadaan yang lebih baik diantaranya:

- Pemeritah Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan dalam rangka percepatan penyampaian Rencana Umum Pengadaan yaitu harus selesai di akhir Triwulan I, penetapan target RUP sebesar 100 %;
- Telah dilakukan workshop dalam rangka tertib adminstrasi pengelolaan keuangan daerah yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural se Kota Tangerang Selatan dengan nara sumber dari: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP).
- Penataan kelembagaan ULP secara tersentral, pemisahan kepengurusan ULP dan LPSE sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Dalam rangka mengurangi kendala terkait proses pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kota telah mewajibkan seluruh pejabat struktural dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengikuti ujian kompetensi pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2015.

3.2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

SILPA Kota Tangerang Selatan cukup tinggi dan kecenderungan mengalami peningkatan, pada tahun 2011 sebesar Rp.430.765.124.802, meningkat hingga Rp.754.524.240.702.- pada tahun 2014. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi anggaran agar tingginya penyerapan anggaran berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan daerah yang telah direncanakan. Jumlah SILPA Kota Tangerang Selatan dari tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Gambar 3.2. berikut ini.



Sumber: LKPJ Tahun 2011-2014

Gambar 3.2
SILPA Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2014